



Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020 Ditandatangani

DPRD Madiun, Bhirawa

Bupati Madiun bersama pimpinan DPRD Kabupaten Madiun, telah menandatangani pengambilan keputusan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, Senin (5/7).

Dilanjutkan diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Ferry Sudarsono kepada Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami disaksikan Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto dan Wakil Ketua DPRD Kab Madiun, Slamet Riyadi S.Sos. M.Pd dan Kuwat Eddy Santoso.

Badan anggaran DPRD Kabupaten Madiun, Jumali dalam laporannya menyatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemda, dapat disampaikan komposisi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Anggaran Pendapatan direncanakan Rp1,757 triliun lebih terealisasi Rp1,842 triliun lebih atau tercapai 104,85 %. Untuk Anggaran Belanja direncanakan Rp1,918 triliun lebih realisasinya Rp1,796 triliun lebih atau tercapai 93,64 %. Sedangkan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan Rp165,839 miliar direalisasi Rp165,739 miliar atau tercapai 99,94 %. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp4,500 miliar direalisasikan Rp4,500 miliar tercapai 100 %.

Dengan demikian, maka secara ringkas dapat dijelaskan, realisasi pendapatan Rp1,842 triliun lebih bila dihadapkan dengan realisasi belanja Rp1,796 triliun lebih, maka terdapat realisasi Surplus Rp45,899 miliar lebih. Untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah Rp165,739 miliar bila dihadapkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Rp4,500 miliar, maka terdapat pembiayaan Netto Rp161,239 miliar lebih.

Atas realisasi Surplus Rp45,500 miliar lebih dan kelebihan realisasi pembiayaan netto Rp161,239 miliar lebih, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan Rp207,138 miliar lebih.

Demikian laporan hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dengan harapan pendapat Badan Anggaran atas hasil pembahasan ini dapat dijadikan pertimbangan untuk disetujui Raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Raperda yang difinitif.

perda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Raperda yang difinitif.

“Untuk itu, keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat dewan yang terhormat dalam rapat paripurna ini,” kata Badan Anggaran DPRD Kab Madiun, Jumadi mengakhiri laporannya.

Setelah pengambilan keputusan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020 di gedung DPRD Kab Madiun tersebut, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dalam sambutannya menyatakan, ada beberapa hal yang harus rumuskan bersama.

Yakni, Pengalokasian SIPLA di perubahan APBD TA 2021 untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang terdampak oleh adanya *refocusing*. Penyesuaian acres gaji untuk APBD TA 2022. Evaluasi penilaian kinerja untuk mendukung perolehan reward DID yang lebih besar.

Percepatan penyelesaian piutang pajak daerah terutama piutang pajak bumi dan bangunan. Percepatan penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19.

Kesempatan itu Bupati Ahmad Dawami, berharap setelah sidang ini, agenda yang mendesak adalah perubahan APBD TA 2021 dan



Setelah ditandatangani bersama, Ketua DPRD kabupaten Madiun, H. Ferry Sudarsono menyerahkan memori pengambilan keputusan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020 kepada Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami di gedung DPRD setempat, Senin (5/7).

APBD TA 2022 yang diawali dari KUA PPAS sebagaimana lazimnya dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Meningkatkan koordinasi baik di jajaran OPD maupun instansi vertikal, jika peningkatan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun Provinsi serta antar pemerintah daerah.

Menyikapi atas informasi terkait APBN yang akan berdampak pada APBD, khususnya penurunan sumber dana dari pusat yang berasal dari dana transfer.

Menyikapi perubahan regulasi dari pusat yang sangat cepat. Sehingga pemerintah daerah harus segera merespon atas perubahan regulasi tersebut.

“Untuk dapat melaksanakan agenda-agenda tersebut, perlu adanya sinergi antar eksekutif dan legislatif, untuk itu mari kita bersama-sama melaksanakan agenda-agenda yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Madiun,” pinta bupati. [dar]